S.J.D.I. HUKUM
BIRO HUKUM
DEPARTEMEN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 29/Permentan/OT.140/6/2008

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 76/Permentan/OT.140/12/2007 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/12/2007 telah ditetapkan jenis dan jumlah pupuk bersubsidi serta rincian per provinsi;

b. bahwa sebagian besar lahan pertanian khususnya sawah intensifikasi telah mengalami kejenuhan fosfat dan kalium; sehingga perlu meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk fosfat dengan mengubah pupuk bersubsidi SP-36 menjadi pupuk Superphos.

c. bahwa atas hal-hal diatas, dipandang perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/12/2007.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Berita Negara nomor 4737.
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.210/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;

21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47/M-DAG/PER/11/2007 tentang Perubahan atas Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/ OT.140/12/2007 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2008;

Memperhatikan : Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-70/M.Ekon/05/2008 tanggal 21 Mei 2008 perihal Kebijakan Pupuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 76/Permentan/OT.140/12/2007 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal I

Mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/ OT.140/12/2007 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2008 sehingga berbunyi sebagai berikut :

a. Pasal 1 butir 11, Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk anorganik (Urea, ZA, Superphos, NPK) dan pupuk organik di dalam negeri.
b. Pasal 5 ayat (1), Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk anorganik (Urea, ZA, Superphos, NPK) dan pupuk organik yang diadakan oleh Produsen.
c. Pasal 7 ayat (2), Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

(1) Pupuk Urea	= Rp. 1.200,- per kg;
(2) Pupuk ZA	= Rp. 1.050,- per kg;
(3) Pupuk Superphos	= Rp. 1.550,- per kg;
(4) Pupuk NPKphonska$_{(15:15:15)}$	= Rp. 1.750,- per kg;
(5) Pupuk NPKpelangi$_{(20:10:10)}$	= Rp. 1.830,- per kg;
(6) Pupuk NPKkujang$_{(30:6:8)}$	= Rp. 1.586,- per kg;
(7) Pupuk Organik	= Rp. 1.000,- per kg;

d. Lampiran 1, 2, 3, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, sehingga menjadi seperti tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

(1) Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2008 dinyatakan masih tetap berlaku.

(2) Terhadap sisa stok pupuk SP-36 bersubsidi yang telah tersimpan di Lini II, Lini III dan Lini IV dapat tetap disalurkan untuk memenuhi kebutuhan pupuk sesuai peruntukkan pupuk bersubsidi sampai dengan 31 Juli 2008.

(3) Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi Superphos diberlakukan mulai tanggal 1 Juni 2008.

(4) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut hingga 1 Juni 2008.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2008

MENTERI PERTANIAN

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Perindustrian;
3. Menteri Perdagangan;
4. Menteri Kelautan dan Perikanan;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
7. Gubernur di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

Lampiran 3.12. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 29/Permentan/OT.140/6/2008
Tanggal : 18 Juni 2008

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 DAN SUPERPHOS BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2008

Subsektor : Perikanan Budidaya

(Ton)

NO.	PROPINSI	Setahun	PUPUK SP-36						PUPUK SUPERPHOS					
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	N A D	1.034	103	93	93	83	72	83	83	72	62	83	93	114
2	SUMATERA UTARA	2.596	260	234	234	208	182	208	208	182	156	208	234	286
3	SUMATERA BARAT	2.011	201	181	181	161	141	161	161	141	121	161	181	221
4	J A M B I	1.321	132	119	119	106	93	106	106	93	79	106	119	145
5	R I A U	862	86	78	78	69	60	69	69	60	52	69	78	95
6	BENGKULU	661	66	59	59	53	46	53	53	46	40	53	59	73
7	SUMATERA SELATAN	2.873	287	259	259	230	201	230	230	201	172	230	259	316
8	BANGKA BELITUNG	201	20	18	18	16	14	16	16	14	12	16	18	22
9	LAMPUNG	3.214	321	289	289	257	225	257	257	225	193	257	289	353
10	KEP. RIAU	23	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	3
11	DKI. JAKARTA	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12	BANTEN	1.092	109	98	98	87	76	87	87	76	65	87	98	120
13	JAWA BARAT	10.629	1.063	957	957	850	744	850	850	744	638	850	957	1.169
14	D.I. YOGYAKARTA	1.436	144	129	129	115	101	115	115	101	86	115	129	158
15	JAWA TENGAH	9.480	948	853	853	758	664	758	758	664	569	758	853	1.043
16	JAWA TIMUR	12.640	1.264	1.138	1.138	1.011	885	1.011	1.011	885	758	1.011	1.138	1.390
17	B A L I	345	34	31	31	28	24	28	28	24	21	28	31	38
18	KALIMANTAN BARAT	517	52	47	47	41	36	41	41	36	31	41	47	57
19	KALIMANTAN TENGAH	345	34	31	31	28	24	28	28	24	21	28	31	38
20	KALIMANTAN SELATAN	532	53	48	48	43	37	43	43	37	32	43	48	59
21	KALIMANTAN TIMUR	460	46	41	41	37	32	37	37	32	28	37	41	51
22	SULAWESI UTARA	275	28	25	25	22	19	22	22	19	17	22	25	30
23	GORONTALO	115	11	10	10	9	8	9	9	8	7	9	10	13
24	SULAWESI TENGAH	287	29	26	26	23	20	23	23	20	17	23	26	32
25	SULAWESI TENGGARA	402	40	36	36	32	28	32	32	28	24	32	36	44
26	SULAWESI SELATAN	2.586	259	233	233	207	181	207	207	181	155	207	233	284
27	SULAWESI BARAT	230	23	21	21	18	16	18	18	16	14	18	21	25
28	NUSA TENGGARA BARAT	862	86	78	78	69	60	69	69	60	52	69	78	95
29	NUSA TENGGARA TIMUR	287	29	26	26	23	20	23	23	20	17	23	26	32
30	MALUKU	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
31	PAPUA	86	9	8	8	7	6	7	7	6	5	7	8	9
32	MALUKU UTARA	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
33	IRJA BARAT	23	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	3
	JUMLAH PROPINSI	**57.456**	**5.746**	**5.171**	**5.171**	**4.596**	**4.022**	**4.596**	**4.596**	**4.022**	**3.447**	**4.596**	**5.171**	**6.320**

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Lampiran 3.7. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 29/Permentan/OT.140/6/2008
Tanggal : 18 Juni 2008

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 DAN SUPERPHOS BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2008

(Ton)

NO.	PROPINSI	Setahun	PUPUK SP-36						PUPUK SUPERPHOS					
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	N A D	14.400	1.440	1.296	1.296	1.152	1.008	1.152	1.152	1.008	864	1.152	1.296	1.584
2	SUMATERA UTARA	36.147	3.615	3.253	3.253	2.892	2.530	2.892	2.892	2.530	2.169	2.892	3.253	3.976
3	SUMATERA BARAT	28.000	2.800	2.520	2.520	2.240	1.960	2.240	2.240	1.960	1.680	2.240	2.520	3.080
4	J A M B I	18.400	1.840	1.656	1.656	1.472	1.288	1.472	1.472	1.288	1.104	1.472	1.656	2.024
5	R I A U	12.000	1.200	1.080	1.080	960	840	960	960	840	720	960	1.080	1.320
6	BENGKULU	9.200	920	828	828	736	644	736	736	644	552	736	828	1.012
7	SUMATERA SELATAN	40.000	4.000	3.600	3.600	3.200	2.800	3.200	3.200	2.800	2.400	3.200	3.600	4.400
8	BANGKA BELITUNG	2.800	280	252	252	224	196	224	224	196	168	224	252	308
9	LAMPUNG	44.745	4.474	4.027	4.027	3.580	3.132	3.580	3.580	3.132	2.685	3.580	4.027	4.922
10	KEP. RIAU	320	32	29	29	26	22	26	26	22	19	26	29	35
11	DKI. JAKARTA	64	6	6	6	5	4	5	5	4	4	5	6	7
12	BANTEN	15.200	1.520	1.368	1.368	1.216	1.064	1.216	1.216	1.064	912	1.216	1.368	1.672
13	JAWA BARAT	148.000	14.800	13.320	13.320	11.840	10.360	11.840	11.840	10.360	8.880	11.840	13.320	16.280
14	D.I. YOGYAKARTA	20.000	2.000	1.800	1.800	1.600	1.400	1.600	1.600	1.400	1.200	1.600	1.800	2.200
15	JAWA TENGAH	132.000	13.200	11.880	11.880	10.560	9.240	10.560	10.560	9.240	7.920	10.560	11.880	14.520
16	JAWA TIMUR	176.000	17.600	15.840	15.840	14.080	12.320	14.080	14.080	12.320	10.560	14.080	15.840	19.360
17	B A L I	4.800	480	432	432	384	336	384	384	336	288	384	432	528
18	KALIMANTAN BARAT	7.200	720	648	648	576	504	576	576	504	432	576	648	792
19	KALIMANTAN TENGAH	4.800	480	432	432	384	336	384	384	336	288	384	432	528
20	KALIMANTAN SELATAN	7.411	741	667	667	593	519	593	593	519	445	593	667	815
21	KALIMANTAN TIMUR	6.400	640	576	576	512	448	512	512	448	384	512	576	704
22	SULAWESI UTARA	3.833	383	345	345	307	268	307	307	268	230	307	345	422
23	GORONTALO	1.600	160	144	144	128	112	128	128	112	96	128	144	176
24	SULAWESI TENGAH	4.000	400	360	360	320	280	320	320	280	240	320	360	440
25	SULAWESI TENGGARA	5.600	560	504	504	448	392	448	448	392	336	448	504	616
26	SULAWESI SELATAN	36.000	3.600	3.240	3.240	2.880	2.520	2.880	2.880	2.520	2.160	2.880	3.240	3.960
27	SULAWESI BARAT	3.200	320	288	288	256	224	256	256	224	192	256	288	352
28	NUSA TENGGARA BARAT	12.000	1.200	1.080	1.080	960	840	960	960	840	720	960	1.080	1.320
29	NUSA TENGGARA TIMUR	4.000	400	360	360	320	280	320	320	280	240	320	360	440
30	MALUKU	200	20	18	18	16	14	16	16	14	12	16	18	22
31	PAPUA	1.200	120	108	108	96	84	96	96	84	72	96	108	132
32	MALUKU UTARA	160	16	14	14	13	11	13	13	11	10	13	14	18
33	IRJA BARAT	320	32	29	29	26	22	26	26	22	19	26	29	35
	JUMLAH PROPINSI	**800.000**	**80.000**	**72.000**	**72.000**	**64.000**	**56.000**	**64.000**	**64.000**	**56.000**	**48.000**	**64.000**	**72.000**	**88.000**

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Lampiran 3.8. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 29/Permentan/OT.140/6/2008
Tanggal : 18 Juni 2008

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 DAN SUPERPHOS BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2008

Subsektor : Tanaman Pangan

(Ton)

NO.	PROPINSI	Setahun	PUPUK SP-36						PUPUK SUPERPHOS					
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	N A D	8.305	830	747	747	664	581	664	664	581	498	664	747	914
2	SUMATERA UTARA	20.846	2.085	1.876	1.876	1.668	1.459	1.668	1.668	1.459	1.251	1.668	1.876	2.293
3	SUMATERA BARAT	16.148	1.615	1.453	1.453	1.292	1.130	1.292	1.292	1.130	969	1.292	1.453	1.776
4	J A M B I	10.611	1.061	955	955	849	743	849	849	743	637	849	955	1.167
5	R I A U	6.921	692	623	623	554	484	554	554	484	415	554	623	761
6	BENGKULU	5.306	531	478	478	424	371	424	424	371	318	424	478	584
7	SUMATERA SELATAN	23.068	2.307	2.076	2.076	1.845	1.615	1.845	1.845	1.615	1.384	1.845	2.076	2.538
8	BANGKA BELITUNG	1.615	161	145	145	129	113	129	129	113	97	129	145	178
9	LAMPUNG	25.805	2.580	2.322	2.322	2.064	1.806	2.064	2.064	1.806	1.548	2.064	2.322	2.839
10	KEP. RIAU	185	18	17	17	15	13	15	15	13	11	15	17	20
11	DKI. JAKARTA	37	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4
12	BANTEN	8.766	877	789	789	701	614	701	701	614	526	701	789	964
13	JAWA BARAT	85.353	8.535	7.682	7.682	6.828	5.975	6.828	6.828	5.975	5.121	6.828	7.682	9.389
14	D.I. YOGYAKARTA	11.534	1.153	1.038	1.038	923	807	923	923	807	692	923	1.038	1.269
15	JAWA TENGAH	76.126	7.613	6.851	6.851	6.090	5.329	6.090	6.090	5.329	4.568	6.090	6.851	8.374
16	JAWA TIMUR	101.501	10.150	9.135	9.135	8.120	7.105	8.120	8.120	7.105	6.090	8.120	9.135	11.165
17	B A L I	2.768	277	249	249	221	194	221	221	194	166	221	249	305
18	KALIMANTAN BARAT	4.152	415	374	374	332	291	332	332	291	249	332	374	457
19	KALIMANTAN TENGAH	2.768	277	249	249	221	194	221	221	194	166	221	249	305
20	KALIMANTAN SELATAN	4.274	427	385	385	342	299	342	342	299	256	342	385	470
21	KALIMANTAN TIMUR	3.691	369	332	332	295	258	295	295	258	221	295	332	406
22	SULAWESI UTARA	2.210	221	199	199	177	155	177	177	155	133	177	199	243
23	GORONTALO	923	92	83	83	74	65	74	74	65	55	74	83	102
24	SULAWESI TENGAH	2.307	231	208	208	185	161	185	185	161	138	185	208	254
25	SULAWESI TENGGARA	3.230	323	291	291	258	226	258	258	226	194	258	291	355
26	SULAWESI SELATAN	20.762	2.076	1.869	1.869	1.661	1.453	1.661	1.661	1.453	1.246	1.661	1.869	2.284
27	SULAWESI BARAT	1.845	185	166	166	148	129	148	148	129	111	148	166	203
28	NUSA TENGGARA BARAT	6.921	692	623	623	554	484	554	554	484	415	554	623	761
29	NUSA TENGGARA TIMUR	2.307	231	208	208	185	161	185	185	161	138	185	208	254
30	MALUKU	115	12	10	10	9	8	9	9	8	7	9	10	13
31	PAPUA	692	69	62	62	55	48	55	55	48	42	55	62	76
32	MALUKU UTARA	92	9	8	8	7	6	7	7	6	6	7	8	10
33	IRJA BARAT	185	18	17	17	15	13	15	15	13	11	15	17	20
	JUMLAH PROPINSI	**461.367**	**46.137**	**41.523**	**41.523**	**36.909**	**32.296**	**36.909**	**36.909**	**32.296**	**27.682**	**36.909**	**41.523**	**50.750**

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Nomor : 29/Permentan/OT.140/6/2008
Tanggal : 18 Juni 2008

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 DAN SUPERPHOS BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2008

Subsektor : Hortikultura

(Ton)

NO.	PROPINSI	Setahun	PUPUK SP-36						PUPUK SUPERPHOS					
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	N A D	705	71	63	63	56	49	56	56	49	42	56	63	78
2	SUMATERA UTARA	1.770	177	159	159	142	124	142	142	124	106	142	159	195
3	SUMATERA BARAT	1.371	137	123	123	110	96	110	110	96	82	110	123	151
4	J A M B I	901	90	81	81	72	63	72	72	63	54	72	81	99
5	R I A U	568	59	53	53	47	41	47	47	41	35	47	53	65
6	BENGKULU	450	45	41	41	36	32	36	36	32	27	36	41	50
7	SUMATERA SELATAN	1.959	196	176	176	157	137	157	157	137	118	157	176	215
8	BANGKA BELITUNG	137	14	12	12	11	10	11	11	10	8	11	12	15
9	LAMPUNG	2.191	219	197	197	175	153	175	175	153	131	175	197	241
10	KEP. RIAU	16	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
11	DKI. JAKARTA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	BANTEN	744	74	67	67	60	52	60	60	52	45	60	67	82
13	JAWA BARAT	7.247	725	652	652	580	507	580	580	507	435	580	652	797
14	D.I. YOGYAKARTA	979	98	88	88	78	69	78	78	69	59	78	88	108
15	JAWA TENGAH	6.464	646	582	582	517	452	517	517	452	388	517	582	711
16	JAWA TIMUR	8.618	862	776	776	689	603	689	689	603	517	689	776	948
17	B A L I	235	24	21	21	19	16	19	19	16	14	19	21	26
18	KALIMANTAN BARAT	353	35	32	32	28	25	28	28	25	21	28	32	39
19	KALIMANTAN TENGAH	235	24	21	21	19	16	19	19	16	14	19	21	26
20	KALIMANTAN SELATAN	363	36	33	33	29	25	29	29	25	22	29	33	40
21	KALIMANTAN TIMUR	313	31	28	28	25	22	25	25	22	19	25	28	34
22	SULAWESI UTARA	188	19	17	17	15	13	15	15	13	11	15	17	21
23	GORONTALO	78	8	7	7	6	5	6	6	5	5	6	7	9
24	SULAWESI TENGAH	196	20	18	18	16	14	16	16	14	12	16	18	22
25	SULAWESI TENGGARA	274	27	25	25	22	19	22	22	19	16	22	25	30
26	SULAWESI SELATAN	1.763	176	159	159	141	123	141	141	123	106	141	159	194
27	SULAWESI BARAT	157	16	14	14	13	11	13	13	11	9	13	14	17
28	NUSA TENGGARA BARAT	588	59	53	53	47	41	47	47	41	35	47	53	65
29	NUSA TENGGARA TIMUR	196	20	18	18	16	14	16	16	14	12	16	18	22
30	MALUKU	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31	PAPUA	59	6	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	6
32	MALUKU UTARA	8	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
33	IRJA BARAT	16	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	JUMLAH PROPINSI	39.173	3.917	3.526	3.526	3.134	2.742	3.134	3.134	2.742	2.350	3.134	3.526	4.309

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Lampiran 3.10. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 29/Permentan/OT.140/6/2008
Tanggal : 18 Juni 2008

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 DAN SUPERPHOS BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2008

Sub Sektor Perkebunan

(Ton)

No	PROPINSI	Setahun	PUPUK SP-36						PUPUK SUPERPHOS					
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
	[illegible]	4.337	434	390	390	347	304	347	347	304	260	347	390	477
	[illegible] SUMATERA UTARA	10.686	1.089	980	980	871	762	871	871	762	653	871	980	1.197
	[illegible] SUMATERA BARAT	8.432	843	759	759	675	590	675	675	590	506	675	759	928
	[illegible]	5.541	554	499	499	443	388	443	443	388	332	443	499	610
	[illegible]	3.614	361	325	325	289	253	289	289	253	217	289	325	398
	[illegible] RIAU	2.771	277	249	249	222	194	222	222	194	166	222	249	305
	[illegible] SUMATERA SELATAN	12.046	1.205	1.084	1.084	964	843	964	964	843	723	964	1.084	1.325
	[illegible] BANGKA BELITUNG	843	84	76	76	67	59	67	67	59	51	67	76	93
	[illegible] LAMPUNG	13.475	1.348	1.213	1.213	1.078	943	1.078	1.078	943	809	1.078	1.213	1.482
	[illegible] KEPULAUAN RIAU	96	10	9	9	8	7	8	8	7	6	8	9	11
	[illegible] DKI JAKARTA	19	2	2	2	2	1	2	2	1	1	2	2	2
	[illegible] BANTEN	4.578	458	412	412	366	320	366	366	320	275	366	412	504
	[illegible] JAWA BARAT	44.571	4.457	4.011	4.011	3.566	3.120	3.566	3.566	3.120	2.674	3.566	4.011	4.903
	[illegible] DI YOGYAKARTA	6.023	602	542	542	482	422	482	482	422	361	482	542	663
	[illegible] JAWA TENGAH	39.753	3.975	3.578	3.578	3.180	2.783	3.180	3.180	2.783	2.385	3.180	3.578	4.373
	[illegible] JAWA TIMUR	53.004	5.300	4.770	4.770	4.240	3.710	4.240	4.240	3.710	3.180	4.240	4.770	5.830
	[illegible]	1.446	145	130	130	116	101	116	116	101	87	116	130	159
	[illegible] KALIMANTAN BARAT	2.168	217	195	195	173	152	173	173	152	130	173	195	239
	[illegible] KALIMANTAN TENGAH	1.446	145	130	130	116	101	116	116	101	87	116	130	159
	[illegible] KALIMANTAN SELATAN	2.232	223	201	201	179	156	179	179	156	134	179	201	246
	[illegible] KALIMANTAN TIMUR	1.927	193	173	173	154	135	154	154	135	116	154	173	212
	[illegible] SULAWESI UTARA	1.154	115	104	104	92	81	92	92	81	69	92	104	127
	[illegible] GORONTALO	482	48	43	43	39	34	39	39	34	29	39	43	53
	[illegible] SULAWESI TENGAH	1.205	120	108	108	96	84	96	96	84	72	96	108	133
	[illegible] SULAWESI TENGGARA	1.686	169	152	152	135	118	135	135	118	101	135	152	186
	[illegible] SULAWESI SELATAN	10.842	1.084	976	976	867	759	867	867	759	650	867	976	1.193
	[illegible] SULAWESI BARAT	964	96	87	87	77	67	77	77	67	58	77	87	106
	[illegible] NUSA TENGGARA BARAT	3.614	361	325	325	289	253	289	289	253	217	289	325	398
	[illegible] NUSA TENGGARA TIMUR	1.205	120	108	108	96	84	96	96	84	72	96	108	133
	[illegible] MALUKU	60	6	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	7
	[illegible] PAPUA	361	36	33	33	29	25	29	29	25	22	29	33	40
	[illegible] MALUKU UTARA	48	5	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	5
	[illegible] PAPUA BARAT	96	10	9	9	8	7	8	8	7	6	8	9	11
	JUMLAH PROPINSI	240.925	24.093	21.683	21.683	19.274	16.865	19.274	19.274	16.865	14.456	19.274	21.683	26.502

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Lampiran 3.11. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 29/Permentan/OT.140/6/2008
Tanggal : 18 Juni 2008

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 DAN SUPERPHOS BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2008

Subsektor : Peternakan

(Ton)

NO.	PROPINSI	Setahun	PUPUK SP-36						PUPUK SUPERPHOS					
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	N A D	19	2	2	2	2	1	2	2	1	1	2	2	2
2	SUMATERA UTARA	49	5	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	5
3	SUMATERA BARAT	38	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4
4	J A M B I	25	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	3
5	R I A U	16	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
6	BENGKULU	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	SUMATERA SELATAN	54	5	5	5	4	4	4	4	4	3	4	5	6
8	BANGKA BELITUNG	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	LAMPUNG	60	6	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	7
10	KEP. RIAU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DKI. JAKARTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	BANTEN	21	2	2	2	2	1	2	2	1	1	2	2	2
13	JAWA BARAT	200	20	18	18	16	14	16	16	14	12	16	18	22
14	D.I. YOGYAKARTA	27	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
15	JAWA TENGAH	178	18	16	16	14	12	14	14	12	11	14	16	20
16	JAWA TIMUR	237	24	21	21	19	17	19	19	17	14	19	21	26
17	B A L I	6	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1
18	KALIMANTAN BARAT	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	KALIMANTAN TENGAH	6	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1
20	KALIMANTAN SELATAN	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	KALIMANTAN TIMUR	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	SULAWESI UTARA	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
23	GORONTALO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	SULAWESI TENGAH	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
25	SULAWESI TENGGARA	8	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
26	SULAWESI SELATAN	49	5	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	5
27	SULAWESI BARAT	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	NUSA TENGGARA BARAT	16	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
29	NUSA TENGGARA TIMUR	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
30	MALUKU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	PAPUA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	MALUKU UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	IRJA BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PROPINSI	**1.079**	**108**	**97**	**97**	**86**	**76**	**86**	**86**	**76**	**65**	**86**	**97**	**119**

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO